Kumawula, Vol.8, No.2, Agustus 2025, 592 – 602
DOI: https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i2.58926
ISSN 2620-844X (online)
ISSN 2809-8498 (cetak)
Tersedia *online* di http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index

PENDIDIKAN POLITIK TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

Mustabsyirotul Ummah Mustofa[1*], Caroline Paskarina[1], Mudiyati Rahmatunnisa[1], Ari Ganjar Herdiansah[1]

[1] Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

[*]Korespondensi : mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence in the school environment is a phenomenon that needs serious attention. As one of the educational sins according to the Ministry of Education and Culture, sexual violence in the school environment needs to be understood and addressed by various parties, one of which is through socialisation and political education on sexual violence. This political education activity was organised as an effort to reduce the number of cases of sexual violence in the school environment. This political education on sexual violence uses a board game as a learning medium that facilitates school students' understanding of the issues presented. The activity involved the participation of various parties, namely SMAN 25 Bandung City, SMAN 12 Bandung City, Daarut Tauhid High School, the West Java OSIS Forum (FOJB), and Mekarjaya Village PKK Cadre, Bandung City. Political education activities include discussions related to what sexual violence is, the kinds of sexual violence that we are aware of or rarely realise, power relations (body politics), and how to handle sexual violence. Activities are packaged in the form of board games, survey participation, and theatre. This activity provides an overview and fosters public awareness of the importance of the issue of sexual violence. With this awareness, it is hoped that students and the community can prevent or respond effectively if sexual violence occurs around them.

Keywords: *Political education; sexual violence; school environment; board game*

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai salah satu dosa pendidikan menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dipahami dan ditangani oleh berbagai pihak, salah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan politik mengenai kekerasan seksual. Kegiatan edukasi politik ini diselenggarakan sebagai satu upaya mengurangi angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Edukasi politik tentang kekerasan seksual ini menggunakan *board game* sebagai medium pembelajaran yang memudahkan pemahaman siswa-siswi sekolah terhadap isu yang disampaikan. Kegiatan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yakni SMAN 25 Kota Bandung, SMAN 12 Kota Bandung, SMA Daarut Tauhid, Forum Osis Jawa Barat (FOJB), serta Kader PKK Kelurahan

RIWAYAT ARTIKEL
Diserahkan : 07/11/2024
Diterima : 24/07/2025
Dipublikasikan : 01/08/2025

Mekarjaya Kota Bandung. Kegiatan pendidikan politik meliputi pembahasan terkait, apa itu kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual baik yang disadari ataupun jarang kita sadari, relasi kuasa (politik tubuh), dan cara penanganan kekerasan seksual. Kegiatan dikemas dalam bentuk *board game*, pengisian survei serta pematerian. Kegiatan ini memberikan gambaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu kekerasan seksual. Dengan kesadaran tersebut diharapkan siswa dan masyarakat dapat mencegah ataupun menanggulangi jikalau terjadi kekerasan seksual di sekitar mereka.

Kata Kunci: Pendidikan politik; kekerasan seksual; lingkungan sekolah; *board game*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan fenomena gunung es yang masih kerap luput dari perhatian serius banyak pihak. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara sederhana karena memiliki dimensi yang multidisipliner dan kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada individu korban, melainkan juga pada tatanan sosial dan nilai-nilai keadilan dalam sistem pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak mencakup setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam konteks ini, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara sistemik.

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, manipulasi, atau ancaman untuk mendapatkan kepuasan seksual tanpa persetujuan korban. Dalam banyak kasus, kekerasan ini terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang. Pelaku seringkali memanfaatkan posisi otoritas, baik secara formal seperti guru atau kepala sekolah, maupun secara simbolik sebagai bagian dari struktur sosial yang patriarkal.

Dari perspektif politik tubuh, tubuh—khususnya tubuh perempuan—sering kali menjadi objek dominasi sosial dan politik. Relasi kuasa termanifestasi dalam cara masyarakat mengatur, menilai, dan mengontrol tubuh, termasuk melalui kekerasan seksual. Dalam kehidupan sehari-hari, ekspresi tubuh seperti cara berjalan, duduk, hingga berbicara pun mencerminkan konstruksi gender yang dilekatkan secara sosial. Kekerasan seksual dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk mendisiplinkan tubuh, memperkuat dominasi, dan mempertahankan struktur sosial yang timpang.

Pemahaman kekerasan seksual sebagai bagian dari praktik kuasa ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar tindakan kriminal individual, tetapi merupakan cerminan dari sistem sosial-politik yang mengabaikan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ini tidak cukup hanya melalui lensa psikologis atau medis, tetapi juga memerlukan analisis politik dan kritis terhadap struktur kuasa yang menopang terjadinya kekerasan.

Data dan fakta tentang kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan. Ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara individu tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 293 kasus kekerasan di lingkungan sekolah, dengan 42% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Jenis kekerasan lain mencakup perundungan (31%), kekerasan fisik (10%), kekerasan psikis (11%), dan kekerasan berbasis kebijakan (6%) (Kompas.com, 2024). Fakta ini menunjukkan

bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik, justru menjadi lokasi terjadinya pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan remaja.

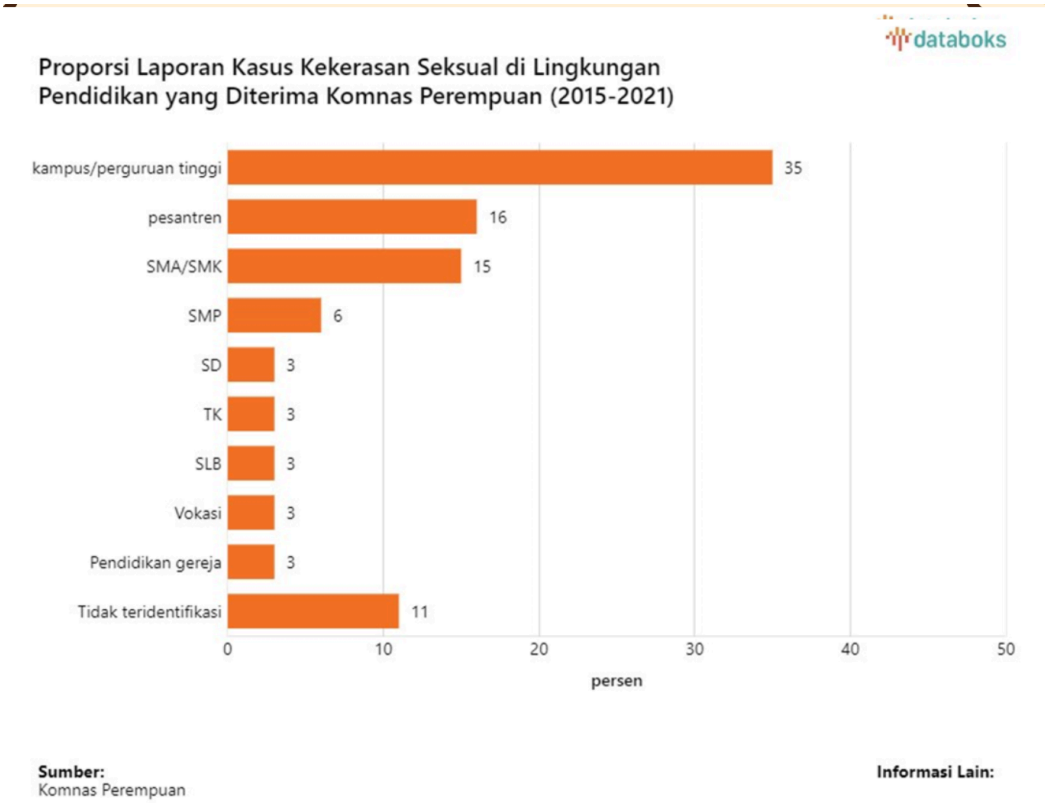

Gambar 1. Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
(Sumber: Databoks, 2023)

Dalam konteks pendidikan nasional, kekerasan seksual telah diidentifikasi sebagai satu dari tiga masalah besar yang disebut sebagai "Tiga Dosa Pendidikan" oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga dosa tersebut meliputi intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menangani persoalan ini mencakup Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah, serta Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang secara spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan nasional adalah kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI), Malang, Jawa Timur. Kasus ini terungkap pada tahun 2021 ketika sejumlah siswa melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah (CNN Indonesia, 2021). Kasus ini menggugah perhatian publik dan pemangku kebijakan, serta memperkuat urgensi untuk memperkuat perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Dampak dari kasus ini tidak hanya mengguncang komunitas sekolah, tetapi juga menjadi katalisator munculnya gerakan reformasi kebijakan pendidikan yang lebih peka terhadap kekerasan seksual.

Upaya sistematis untuk mencegah kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendidikan seksual komprehensif yang menyasar remaja. Pendidikan ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja agar mampu mengenali, menghindari, dan menolak tindakan kekerasan seksual. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya sekolah yang menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak individu atas tubuh dan integritasnya.

Namun demikian, selama ini pendekatan terhadap kekerasan seksual di sekolah cenderung terbatas pada aspek psikologis dan kesehatan. Diperlukan perluasan perspektif dengan mengintegrasikan analisis politik, termasuk relasi kuasa dan politik tubuh. Perspektif ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap akar struktural dari kekerasan seksual serta membuka ruang bagi transformasi budaya dan kebijakan.

Kekerasan seksual di sekolah adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan integritas tubuh individu. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, edukasi politik, serta perubahan norma sosial. Ref Inisiatif seperti yang dilakukan oleh kelompok pengabdian masyarakat Ilmu Politik FISIP Unpad, yang mengedukasi siswa dan guru dari sudut pandang politik, merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengakuan dan perlindungan atas kedaulatan tubuh di lingkungan pendidikan. Kegiatan edukasi ini diharapkan dapat membentuk kesadaran dan pemahaman mendasar bahwa relasi kuasa dan politik atas tubuh memiliki peran penting untuk pencegahan kekerasan seksual terutama di lingkungan Pendidikan.

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokus pelaksanaan edukasi politik kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan dorongan dari berbagai pihak yang berkolaborasi dengan pihak Ilmu Politik FISIP Unpad, dorongan pembahasan isu tersebut antara lain datang dari pihak SMAN 25 Kota Bandung dan Kelurahan Mekarjaya, yang mana isu kekerasan seksual menjadi perhatian mereka. Sehingga kegiatan edukasi politik difokuskan di wilayah Kota Bandung.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PPM) ini terintegrasi dengan program *Project Based Learning* (PBL) Ilmu Politik Mengabdi. Kegiatan ini diikuti oleh empat orang tim dosen sebagai Dosen pendamping lapangan dan 4 kelompok mahasiswa yang akan berperan sebagai fasilitator kegiatan Politik Asik. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 3 Mei hingga 28 Juni 2024 dengan melibatkan 4 kelompok yang terdiri dari 20 mahasiswa/i program studi Ilmu Politik angkatan 2022, masing-masing kelompok dibina oleh satu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Program Edukasi Politik Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan, yakni: tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi kegiatan. Tahapan pelaksanaan program dirancang untuk memastikan bahwa setiap rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan Pendidikan politik yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi dengan pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan bermain games disertai diskusi bersama dengan audiens. Dalam kegiatan terdapat tiga games yang dimainkan sebagai simulasi kekerasan seksual di lingkungan sekolah, yakni *game Mr. White, game Spyfall* dan game Kartu Ilustrasi. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan survey untuk mengetahui pemahaman peserta terkait kekerasan seksual.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan siswa siswi SMAN 25 Kota Bandung, SMAN 12 Kota Bandung, SMA Daarut Tauhid, Forum Osis Jawa Barat (FOJB), serta Kader PKK, Karang Taruna dan LPM Kelurahan Mekarjaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merencanakan Program Edukasi Politik Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Program edukasi politik ini berupaya memberikan pemahaman mendasar tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah kepada siswa dengan metode yang menarik bagi para siswa. Penggunaan metode yang menarik disesuaikan dengan konteks perkembangan kondisi generasi Z saat ini. Pemilihan metode edukasi politik

menggunakan *board game* dan card game menjadi salah satu pilihan untuk bisa memberikan Gambaran dan pemahaman terkait isu-isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Kegiatan perencanaan ini dimulai dengan memberikan pembekalan bagi mahasiswa Ilmu Politik Semester 3 yang terlibat sebagai fasilitator program. Kegiatan pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa fasilitator karena merupakan bagian integral dari proses pembelajaran *Project Based Learning* (PBL).

Mahasiswa yang bertindak sebagai fasilitator mendapatkan pembekalan materi berkaitan dengan isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang terdiri dari 5 sesi, yakni:

1. Kegiatan pembekalan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 untuk memberikan gambaran *board game* yang akan digunakan selama kegiatan PPM. Kegiatan ini difasilitasi oleh tim *Board game* PPM Politik Asik. Tim Politik Asik lebih dulu melakukan penyesuaian *board game* dan card game yang akan digunakan untuk program kegiatan yang sesuai untuk topik kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan audiens yang dikhususkan kepada para siswa.
2. Kegiatan pembekalan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan menghadirkan narasumber Endah Sarwendah, S.Kep., Ners., M.Kep selaku dosen Keperawatan Jiwa STIKES Dustira tentang Kekerasan Seksual pada Remaja.
3. Kegiatan pembekalan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, pembekalan untuk mahasiswa fasilitator bersama Ibu Dra. Mudiyanti Rahmatunnisa, MA., Ph.D dengan tema "Memahami Pentingnya Isu Kekerasan Seksual dalam Perspektif Politik dan Kebijakan Pendidikan". Serta pembekalan dari Ibu Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. yang membahas tentang "Memahami Relasi Kuasa dan Politik Tubuh dalam Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan".
4. Kegiatan pembekalan keempat dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 oleh Ari Ganjar Herdiansah, Ph.D membahas mengenai "Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual". Pada hari yang sama, mahasiswa fasilitator juga melakukan pemantapan sebagai master games untuk bisa memandu kegiatan PPM.
5. Kegiatan persiapan dan pembuatan alat peraga untuk kegiatan PPM Politik Asik serta penentuan target sekolah yang akan dikunjungi selama program PPM berlangsung.

Selama proses pembekalan bagi mahasiswa fasilitator berlangsung, tim dosen PPM melakukan berkomunikasi dengan pihak sekolah-sekolah dan Kelurahan yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Sehingga saat selesai rangkaian pembekalan bagi mahasiswa fasilitator, program edukasi politik dapat berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Program Edukasi Politik Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Edukasi politik kekerasan seksual di lingkungan sekolah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar dan pengetahuan untuk tindak pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Program ini dirancang dengan pendekatan interaktif dengan menggunakan *board game* dan *card game* sebagai alat peraga untuk mengilustrasikan dan mensimulasikan contoh kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Selain menggunakan *board game*, kegiatan mencakup pemberian materi dan diskusi dari ahli, pengisian kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta serta evaluasi berkelanjutan untuk melihat respon dari berbagai kelompok sasaran. Selama program berlangsung, tim PPM dan fasilitator mahasiswa memilih slogan #BersamaCiptakanRuangAman sebagai *tagline* kegiatan.

Pada pelaksanaan PPM, dosen tim PPM berkolaborasi dengan mahasiswa selaku fasilitator PPM dalam menjalankan program

PPM yang direncanakan. Secara keseluruhan terdapat 5 lokasi dan mitra pelaksanaan kegiatan PPM dengan total 8 kegiatan yang dilangsungkan.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan PPM

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Narasumber	Peserta Kegiatan
1.	17 Mei 2024	SMAN 25 Bandung	Fasilitator PPM	100 siswi yang mengikuti kegiatan keputrian sekolah pada hari jumat. Pada kegiatan ini, games yang digunakan hanya satu jenis games yakni *undercover* dikarenakan keterbatasan waktu dalam rangka mengisi waktu ibadah jumat.
2.	30 Mei 2024	SMAN 12 Bandung	Fasilitator PP	Kelompok pengurus DKM/Rohis SMAN 12 Bandung dan kelompok Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK). Kegiatan PPM dilaksanakan terpisah oleh 2 kelompok fasilitator mahasiswa untuk 2 kelompok siswa tersebut, dimana 10 orang dari pengurus DKM SMAN 12, 10 orang dari pengurus OSIS dan 5 orang dari pengurus MPK. Secara total, kegiatan ini diikuti 25 peserta di hari pertama. Kami memberikan 3 (tiga) rangkaian yang dimulai dari pemberian game pertama yang bernama Mr. White sebagai pembuka dari kegiatan pengabdian, lalu dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai apa itu kekerasan seksual hingga cara penanganannya dengan konsep presentasi dan cerita membuat peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Kegiatan pun diakhiri dengan game kedua yang bernama game kartu yang berisikan tentang jenis-jenis kekerasan seksual.
3.	31 Mei 2024	SMAN 12 Bandung	Fasilitator PPM	Siswi SMAN 12 Bandung yang diintegrasikan dengan kegiatan keputrian sekolah pada hari Jumat sejumlah 74 orang. Pada kegiatan ini hanya diberikan materi tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah sehubungan dengan durasi waktu yang mengikuti waktu ibadah sholat jumat.
4.	11 Juni 2024	SMA Daarut Tauhid Putri	Fasilitator PPM	Siswi kelas XI dari sekolah tersebut. Yang berjumlah 54 orang.
5.	20 Juni 2024	Kampus FISIP Unpad Dago	Fasilitator PPM dan Tim Dosen PPM	Diikuti oleh peserta sebanyak 31 orang pengurus OSIS dari berbagai sekolah yang tergabung dalam FOJB. Kegiatan ini dikemas dengan aktivitas bermain *card game* kekerasan seksual, pemberian materi dan tanya jawab .
	28 Juni 2024	Kelurahan Mekarjaya	Fasilitator dan Tim Dosen	Diikuti oleh PKK, Karang Taruna dan LPM Kelurahan Mekarjaya dengan total peserta 52 orang, yang terdiri dari 4 orang perwakilan LPM, 8 orang perwakilan Karang Taruna dan 40 orang kader PKK dari perwakilan masing-masing RW. Kegiatan diisi dengan pemberian materi, games cerdas cermat dan *undercover*.

(Sumber: Penulis, 2024)

Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Edukasi Politik di SMAN 25 Bandung
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Edukasi Politik di SMAN 12 Bandung hari ke-1
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Edukasi Politik di SMAN 12 Bandung hari ke-2
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Selama rangkaian program berlangsung, peserta didorong memahami dan memiliki kesadaran pentingnya isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hal ini menjadi penting untuk dipahami disebabkan isu kekerasan seksual merupakan isu kompleks. Menurut Komnas Perempuan (2021), "ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender" adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Maka peserta perlu memahami posisi relasi kuasa di lingkungan sekolah antara siswa Perempuan dengan siswa laki-laki, siswa senior dengan siswa junior, siswa dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan caraka sekolah.

Peserta diberikan pemahaman dasar tentang relasi kuasa untuk melihat potensi kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekolah. Sementara materi terkait politik tubuh diberikan dengan tujuan peserta dapat memahami otoritas atas tubuhnya sendiri untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Gambar 4. Rangkaian Kegiatan Edukasi Politik di SMA Daarut Tauhid Bandung
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Pemahaman mendasar yang perlu dipahami peserta berkaitan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Pasal 10 ayat 2,

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, jenis-jenis kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Gambar 5. Rangkaian Kegiatan Edukasi Forum OSIS Jawa Barat
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Gambar 6. Rangkaian Kegiatan Edukasi Kelurahan Mekarjaya
(Sumber: Dokumentasi Tim PPM, 2024)

Selain memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual, materi edukasi juga memberikan gambaran dampak dari kekerasan seksual yang terjadi yang meliputi dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial.

- Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
- Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
- Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lain (Sarwendah, 2024).

Peserta juga diberikan 21 (dua puluh satu) contoh kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang dipublikasikan oleh Kemendikbud RI sebagai Gambaran jenis-jenis kekerasan seksual, seperti dalam contoh gambar berikut.

Gambar 7. Contoh Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
(Sumber: Kemdikbud RI)

Selain itu, dampak kekerasan seksual di lingkungan sekolah juga dapat berupa Menghambat pencapaian prestasi akademik

atau karir korban. Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal, peserta didik keluar sekolah sebelum waktu kelulusan pendidik dan tendik kehilangan mata pencahariannya di dunia Pendidikan, mendiskreditkan posisi satuan Pendidikan (Sarwendah, 2024).

Setelah menjelaskan terkait dampak, muatan materi selanjutnya mengenai pencegahan dan penanganan jika mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pada pematerian ini, peserta diajak untuk memberikan curah pendapat untuk dapat mencegah kekerasan seksual dan cara menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Gambar 8. Poster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
(Sumber: Output PBL Mahasiswa Fasilitator, 2024)

Evaluasi dan Feedback Program Edukasi Politik

Evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang melibatkan mahasiswa fasilitator selesai. Fokus utama evaluasi ini adalah untuk menilai beberapa aspek penting dari kegiatan tersebut. Pertama, membahas urgensi mengangkat tema kekerasan seksual di lingkungan sekolah, mengingat pentingnya pemahaman dini terkait isu tersebut di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Topik ini dianggap krusial karena kasus kekerasan seksual sering kali kurang disadari atau dilaporkan, dan edukasi di tingkat sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peka terhadap tanda-tanda awal kekerasan tersebut.

Dari proses yang sudah dilaksanakan, dampak pemberian edukasi terlihat dari peningkatan pemahaman siswa yang dilihat pada saat games sesi terakhir yang mengulas kembali jenis-jenis kekerasan seksual. Dari sesi games tersebut, peserta dapat menjawab dengan betul beberapa pertanyaan yang diajukan, serta dapat memahami konteks kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Kedua, evaluasi inimelihat efektivitas metode yang dipilih, yaitu *board game*, dalam menyampaikan materi pendidikan politik yang relevan dengan tema kekerasan seksual. *Board game* dipilih sebagai metode pembelajaran interaktif yang diharapkan dapat menarik minat peserta dan mempermudah pemahaman melalui simulasi atau permainan peran. Efektivitas *board game* akan dinilai dari seberapa jauh peserta dapat menyerap informasi yang disampaikan serta memahami implikasi politik dan sosial dari tema yang diangkat.

Dari enam rangkaian kegiatan, didapati dampak dari edukasi politik terkait kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat terlihat, terutama dengan adanya peningkatan pemahaman di sesi akhir games yang dimainkan. Selain itu, terdapat pula sesi diskusi dengan jenis-jenis pertanyaan reflektif dan mendalam yang menambah konteks empiris bagi peserta.

Hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan edukasi politik ini adalah terbatasnya alokasi waktu yang diberikan oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan program, terutama jika alokasi waktu program untuk kegiatan

keputrian yang hanya berlangsung selama 30 menit sampai maksimal 45 menit. Hal ini berdampak pada muatan materi tidak dapat diberikan secara utuh kepada siswa sekolah.

Rencana keberlanjutan program "Politik Asik" berfokus pada beberapa aspek penting untuk memastikan program ini dapat terus berjalan dan berdampak dalam jangka panjang. Salah satu langkah pertama adalah melakukan evaluasi keberlanjutan program, di mana efektivitas dan relevansi materi serta metode yang digunakan akan dinilai. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, serta tetap relevan dalam menyampaikan pendidikan politik, khususnya di kalangan anak muda.

Selain itu, program ini juga akan berfokus pada pengembangan model dan prototipe alat peraga yang lebih inovatif dan menarik. Prototipe alat peraga seperti *board game* akan terus dikembangkan agar dapat mencakup berbagai tema politik sehari-hari (daily politics). Pengembangan ini penting agar materi yang disampaikan tetap menarik dan mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang. Secara keseluruhan, rencana ini diharapkan dapat memastikan bahwa program "Politik Asik" melalui *board game* dapat menjadi media pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, meningkatkan pemahaman politik, serta memperkuat partisipasi politik di Indonesia.

SIMPULAN

Edukasi politik kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan metode board game menunjukkan dampak positif bagi kalangan siswa sekolah dalam Upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu kekerasan seksual. Pemilihan board game dan card game sebagai alat peraga edukasi politik memiliki kelebihan untuk menarik perhatian siswa dengan menyajikan materi secara interaktif dan kreatif dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis. Meski demikian terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan edukasi politik terutama dalam hal durasi program yang sangat terbatas dikarenakan alokasi waktu dari pihak sekolah yang cukup singkat.

Namun, edukasi politik ini perlu dikembangkan dan dilanjutkan dalam cakupan yang lebih luas untuk bisa lebih banyak menjangkau siswa sekolah di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka pencegahan kekerasan seksual. Topik yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan bagaimana relasi kuasa di sekolah dapat menjadi faktor pemicu kekerasan seksual, dimana seringkali siswa dalam kondisi kuasa yang lebih rendah sehingga takut dan terintimidasi untuk melakukan perlawanan dan pembelaan diri. Temuan ini merupakan hasil refleksi tim PPM selama kegiatan berlangsung. Sehingga perlu edukasi politik yang lebih luas dan lebih massif di berbagai wilayah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PPM Ilmu Politik Mengabdi topik Edukasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah berterima kasih kepada 20 orang mahasiswa ilmu politik semester 3 yang menjadi fasilitator kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan PBL mahasiswa. Mahasiswa tersebut terdiri dari: Vannissa Andini, M. Azri Arifin, Tsabita Zhahrina Dini, Satria Wildan, Fazri Adam Fahlevi Sitorus, Alia Putri Khuzaimah, Syafira Thabita Damayanti, Malfa Emilia Salsabilla, Yuni Astika, Dwi Putri Br Manik, Dinda Sania Malik, Nabila Ananda Husaini, Rahman Wanda Hermawan, Timothy Gideon Nugraha Siregar, Chara Bregita, Natasha Jannice Bukit, Gregorius Ken Mahisa Iswara Muhammad Alfatih, Muhammad Saeful Aziz, Nurul Indah Febriani, Fadel Muhammad Aryan. Penghargaan juga diberikan sebesar-besarnya kepada Tim Board Game Politik Asik, yang terdiri dari Rafif Sakti Utama, Mutia Kartika Andalus, Salman Muhammad, dan Grafito Hendro yang telah merancang board game dan

card game yang digunakan sebagai alat peraga edukasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2021). Kasus Kekerasan Seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia, Korban Mulai Bersaksi. Diakses dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210609104832-12-652191/kasus-kekerasan-seksual-di-sma-selamat-pagi-indonesia-korban-mulai-bersaksi

Databoks.Katadata. (2023). Kampus, Lingkungan Pendidikan dengan Kekerasan Seksual Terbanyak. Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1b7e45784fb02b3/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak#:~:text=Selama%20periode%202015-2021%2C%20Komnas%20Perempuan%20menerima%2067%20laporan,kekerasan%20seksual%20adalah%20pesantren%20%2816%25%29%20dan%20SMA%2FSMK%20%2815%25%29.

Komnas Perempuan. (2021). Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Diakses dari: https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025

Kompas.co.m. (2024). "JPPI: Sepanjang Tahun 2024 Ada 293 Kasus Kekerasan di Sekolah", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/24/163509171/jppi-sepanjang-tahun-2024-ada-293-kasus-kekerasan-di-sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

Merdekadari Kekerasan Kemdikbud. (2024). 21 Jenis Kekerasan Seksual. https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/21jenis-kekerasan-seksual/

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sarwendah, Endah. (2024). Kekrasan Seksual Pada Remaja. Materi disampaikan dalam kegiatan Pembekalan MBKM Ilmu Politik dengan tema : Edukasi Politik Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Melalui Boardgame.